

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

A'an Effendi, Freddy Poernomo dan IG. NG Indra S. Ranuh, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Ahmad redi dan Ibnu sina, *Omnibus Law (diskursus pengadopsiannya ke dalam sistem perundang-undangan nasional)*, Raja Wali Pers, Depok, 2020.

Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Badriyah khaleed, *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) panduan praktis Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hil-Co, Jakarta, 1992.

-----, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Madju, Bandung,

Benjamin Mangkoedilaga, *Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, Suatu proseppek di Masa Datang*, Angkasa, Bandung, 1998.

- B.Lopa dan A. Hamzah, *Mengenai Peradilan Tata Usaha Negara*, sinar grafika, Jakarta, 1993.
- Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012.
- Djoko Prakoso, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Endra Wijaya, *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta, 2011.
- Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Transformasi & Refleksi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian Hukum*, Keni Media, Bandung, 2016.
- E. Utrecht dan Moh Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ictiar Baru, Jakarta, 1990.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1991.
- Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Perss, Jakarta, 2009.
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing ditinjau dari Konsep Hubungan Kerja antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2016.

Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1975.

Marulak Pardede, *Omnibus Law Dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja)*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2021.

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993.

Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2004.

-----, *Teori Negara Hukum Modern*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

Muhammad yasin dkk, *Anotasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*, UI-CSGAR, Jakarta, 2017.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

Otje Salman, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama, Jakarta, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah mada press, Yogyakarta, 2005.

Priyatmanto Abdoellah, *Revalitas kewenangan PTUN "gagasan perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020.

- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, , Raja Wali Pers, Jakarta, 2011.
- Ridwan, *Diskresi & tanggung jawab Pemerintah*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2014
- Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Pt. Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- R. Soegijatno Tjakra Negara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.
- Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.
- Soerjono Soekonto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers: Jakarta, 2011.
- Soesilo Zauhar, *Reformasi Administrasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Supandi, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Alumni, Bandung, 2016.
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- S. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.



Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.

Viktor situmorang dan Soedibyo, *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

W. Riawan Tjandra, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.

Wicipto Setiadi, *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Yudhi Setiawan dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktek*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Yuslim, *Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, cetakan ke 3, Jakarta 2017.

Zainuddin Ali, *Metode Penelian Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan ke-2, Jakarta, 2011.

Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.

JURNAL

Abdul Qodir Jaelani, *Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 6, No. 2 Desember 2017.

Ade Juang Nirboyo, Potensi korupsi dalam perizinan lingkungan melalui sistem *Online Single Submission* pasca Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, Jurnal Jatiswara, volume 36 No, 2 Juni 2021, hlm 221.

Ahmad Dahlan Hasibuan dan Ferry Aries Suranta, *Faktor Penyebab tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Upaya Penanggulangannya (Analisis Kasus Putusan PTUN Medan No: 17/G/2000/PTUN-MDN)*, Jurnal Mercatoria, Vol 6 No. 2 Desember 2013.

Bambang Heriyanto, *Problematika Penyelesaian perkara “Fiktif Positif” di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pakuan Law Review, Volume , Januari-Juni 2019.

Desi Arianing Arru, *Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia*, Jurnal Jurisdiction, Volume 2, No. 5 September 2019.

Diah Rachma Aprianty, *“Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sambutan kota Samarinda,”* Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4, No. 4 tahun 2016.

Edmon Makarim, *Keautentikan dokumen publik elektronik dalam administrasi pemerintahan dan pelayanan publik*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45 No. 4 Oktober-Desember 2015.

Erlin Triartha Yuliani, *Perbandingan antara Fiktif Negatif dan Fiktif Positif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*

dengan Fiktif Positif dalam Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Permasalahannya.,
University Of Bengkulu Law Journal, Volume 5 No. 1, April 2020.

Enrico simajuntak, *Perkara Fiktif Postif dan permasalahan hukumnya,* Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3, November 2017.

Desy Wulandari, *Pengujian Keputusan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara,* Jurnal Lex Renaissance, Vol 5 No 1 Januari 2020.

Ismail Rumadan, *Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Ta,ta Usaha Negara,* Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 3, November 2012.

Muhammad Afifudin Soleh, *Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap,* Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, 2018.

M. Guntur Hamzah, *Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Kaitannya dengan perkembangan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara,* dalam Ahmad, *Konsepi Fiktif Positif : Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara,* Jurnal Hukum Replik, Volume 5, 2 September 2017.

Surya Mukti Pratama, *Pengaturan Baru Keputusan Fiktif Positif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan kaitannya dengan Kompetensi PTUN,* Jurnal Rechtsvinding, 18 November 2020.

Vani Wirawan, *Penerapan E-Government dalam menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 kontemporer di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Volume 1, No. 1 Maret 2020.

WEBSITE

Website BPK : <https://peraturan.bpk.go.id> (terakhir kali diakses pada 14 Agustus 2021)

Website Hukum Online : <https://www.hukumonline.com> (terakhir kali diakses pada 14 Februari 2021)

Website KUMPARAN : <https://kumparan.com> (terakhir diakses 25 Februari 2021)

Website Integrity law Firm : <https://www.integritylaw.id/> (terakhir diakses 17 Agustus 2021)

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, “*Lembaran Negara R.I.A* Tahun 1986 Nomor 77, tambahan *Lembaran Negara R.I* , Nomor 3344.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “*Lembaran Negara RI*, Tahun 2008 Nomor 58, tambahan *lembaran Negara R.I* Nomor 4843.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik “*Lembaran Negara R.I* Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan *Lembaran Negara R.I.* 4846.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, *Lembaran Negara R.I* tahun 2008, Nomor 139 tambahan *Lembaran Negara RI* Nomor 489.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik “*Lembaran Negara R.I* , Tahun 2009 Nomor 112, tambahan *Lembaran Negara R.I*, Nomor 5038.

Undang-Undang Republik Indonesia 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan” *Lembaran Negara R.I* Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan *Lembaran Negara R.I* Nomor 5071.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (*Lembaran Negara R.I* Tahun 2009 Nomor 157, tambahan *Lembaran Negara R. I*, Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, “*Lembaran Negara R.I*, Tahun 2009, Nomor 160, tambahan *Lembaran Negara R.I*, Nomor 5079.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, “*Lembaran Negara R.I*, Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan *Lembaran Negara R.I* Nomor 5512.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian,
“*Lembaran Negara R.I* Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan *Lembaran Negara R.I*
Nomor 5492.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan., “ *Lembaran Negara R.I.* ” Tahun 2014 Nomor 292 dan
Tambahan Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 5601.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja
“*Lembaran Negara R .I.*” Tahun 2020 Nomor 245 *Tambahan lembaran negara*
R.I Tahun 2020 Nomor 6573.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik “*Lembaran*
Negara RI ” Tahun 2012 Nomor 215, *Tambahan Lembaran Negara RI* Tahun
2012 Nomor 5357.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online single submission*
(OSS) “ *Lembaran Negara RI* “ Tahun 2018 Nomor, *Tambahan Lembaran Negara*
RI Tahun 2018 Nomor, 6215.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan
Strategis Nasional Pengembangan *e-government*.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Pedoman Beracara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan

guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintah.

“*Berita Negara R. P*” tahun 2017 Nomor 1751.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Peradilan.

Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanganan pendaftaran perkara untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan pasca berlakunya undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PUTUSAN

Putusan Nomor 2/P/FP/2016/PTUN-PDG

Putusan Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SBY

Putusan Nomor 2/P/FP/2021/PTUN-JKT

Putusan MK Nomor 77/PUU-XV/2017

